

**PENGARUH KEBIJAKAN AGRARIA TERHADAP KEMISKINAN
STRUKTURAL: PENELITIAN PADA PETANI GUREM DI KABUPATEN
GRESIK, JAWA TIMUR**

(Ujian Tengah Semester)

Oleh

RUTH STEVY TOBING

NPM 2416041131



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	10
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	10
1.4 MANFAAT PENELITIAN	10
BAB II.....	12
2.1 PENELITIAN TERDAHULU.....	12
2.2 LANDASAN TEORI.....	19
2.2.1 <i>GRAND THEORY</i> : Teori Konflik oleh Karl Max.....	19
2.2.2 <i>MIDDLE THEORY</i> : Teori <i>Policy Failure Theory</i>	21
2.2.3 <i>APPLIED THEORY</i> : Teori New Public Service (NPS).....	23
2.2.4 PETANI GUREM.....	25
2.2.5 KEMISKINAN STRUKTURAL.....	25
2.2.6 KEBIJAKAN AGRARIA	26
2.2.7 KESEJAHTERAAN	26
2.3 KERANGKA BERPIKIR.....	26
BAB III	29
3.1 TIPE PENELITIAN.....	29
3.2 FOKUS PENELITIAN	30
3.3 LOKASI PENELITIAN	32
3.4.1 JENIS DATA.....	33
3.4.2 SUMBER DATA.....	33
3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	35
3.6 TEKNIK ANALISIS DATA	38
3.7 TEKNIK KEABSAHAN DATA.....	41
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Kaitan antara Kemiskinan Struktural, Kebijakan Agraria, dan Petani Gurem	8
Gambar 2. Kerangka Berpikir	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	16
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan alam dalam produksi pangan. Luas wilayah pertanian di Indonesia yang meliputi sawah, ladang, serta lahan perkebunan menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi nasional sejak masa sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Di satu sisi sektor pertanian menjadi tulang punggung penyedia pangan nasional, tetapi disisi lain masih banyak petani di Indonesia yang terjebak dalam siklus kemiskinan. Fenomena ini disebut juga sebagai kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang bukan akibat dari keterbatasan individu tetapi disebabkan karena struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak merata (kesenjangan sosial) yang berdampak pada petani dan menjebak mereka sebagai pihak yang dirugikan dan lemah.

Kemiskinan struktural dapat dipahami sebagai kondisi dalam sistem sosial-ekonomi yang membuat kekuasaan serta sumber daya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga membatasi kelompok lain untuk memperoleh akses dan memanfaatkan peluang ekonomi maupun fasilitas yang sesungguhnya tersedia. Situasi ini semakin diperparah oleh lemahnya praktik demokrasi, rapuhnya integrasi ekonomi nasional, kurang optimalnya peran pemerintah dalam meredam ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kerusakan ekosistem, serta adanya kebijakan yang memfasilitasi monopoli ekonomi dan memperlebar jurang sosial. Dengan demikian, struktur yang timpang tersebut tidak hanya menciptakan kemiskinan, tetapi juga mempertahankan dan mewariskannya dalam kehidupan Masyarakat (Saifuloh, 2023).

Fenomena kemiskinan struktural petani ini tidak lahir baru-baru ini, tetapi sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Krisis ekonomi pada awal abad ke-19 membuat

pemerintah kolonial Belanda menggunakan *Cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa pada tahun 1830. Melalui kebijakan ini, para petani di Jawa diminta menanam jenis tanaman untuk dipasarkan keluar negeri demi memenuhi kebutuhan ekonomi Belanda. Kebijakan ini memberi keuntungan besar bagi Belanda, dengan surplus mencapai 832 juta florin dari tahun 1831 hingga 1877. Tetapi dampak negative dari *Cultuurstelsel* sangat terasa bagi masyarakat setempat. Petani terpaksa bekerja keras, mengalami kelangkaan makanan, kelaparan hebat, bahkan terjadi kematian dalam jumlah besar, terutama pada masa krisis di tahun 1840-an. Di beberapa wilayah seperti Grobogan dan Demak, keluhan terhadap upah yang rendah dan perlakuan tidak adil oleh para pemimpin setempat semakin meningkat, sehingga memaksa banyak petani tembakau meninggalkan desa mereka. Praktik *cultuurstelsel* juga memengaruhi struktur pengelolaan tanah hingga saat ini, seperti ketimpangan pengelolaan lahan (Zulyanti et al., 2025).

Kritik terhadap *cultuurstelsel* yang dibentuk oleh kalangan kolonial Belanda akhirnya melahirkan Agrarische Wet 1870 yang mereformasi sistem agraria. Agrarische Wet 1870 memperkenalkan asas *domein verklaring* yang menyatakan bahwa tanah tanpa sertifikat kepemilikan dianggap milik negara dan dapat disewakan kepada investor asing hingga jangka waktu panjang. Penerapan Agrarische Wet 1870 juga membuka peluang bagi pertumbuhan industri perkebunan modern di Jawa, khususnya sektor gula. Pemerintah kolonial memberi dukungan dan memfasilitasi penelitian dan pendidikan teknis. Pada kenyataan di lapangan, peningkatan produksi ekspor tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani. Petani semakin terjebak dalam sistem kerja paksa, utang, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang tajam. Karena kondisi ini lah yang memicu berbagai bentuk perlawanan petani, baik secara terbuka maupun covert, untuk memperjuangkan krisis agraria sosial yang mendalam pada masa kolonial.

Warisan dari kebijakan agraria kolonial Belanda seperti Agrarische Wet 1870 dan asas *domein verklaring* menjadi akar permasalahan agraria di Indonesia sampai

saat ini. Eksploitasi tanah dan hak tawar petani yang sangat lemah pada masa kolonial sudah menciptakan ketimpangan akan kepemilikan tanah yang mendalam. Banyak masyarakat tani di Jawa dan wilayah lainnya hingga kini masih mengalami keterbatasan akses tanah produktif hingga berdampak pada kemiskinan struktural dan kesenjangan sosial-ekonomi para petani. Ketimpangan ini memperlemah kohesi sosial dan kedaulatan petani sebagai tokoh agraris, yang terlihat dari maraknya konflik agraria, perampasan tanah oleh para penguasa, dan marginalisasi petani kecil.

Sistem agraria yang tidak berpihak kepada petani juga tercermin dalam pembagian tanah yang masih tidak merata karena banyak lahan produktif para petani dikuasai oleh petinggi dan orang-orang yang memiliki kuasa, sementara mayoritas petani masih berstatus sebagai penggarap tanpa kepemilikan sah. Ini merupakan fenomena dari petani gurem. Kondisi ini mengakibatkan kemiskinan di pedesaan, keterbatasan produktivitas pertanian, dan terancamnya kelestarian lingkungan akibat eksploitasi tanah berlebihan.

Setelah kemerdekaan, pemerintah memang berupaya melakukan reformasi agraria. Tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Penyaluran tanah untuk rakyat kecil masih terhambat karena adanya kepentingan politik, konflik tanah dengan perkebunan besar, dan pemerintah yang tidak berpihak. Pada akhirnya, mayoritas petani di Indonesia masih menggarap lahan yang sangat sempit akibat dari distribusi tanah yang tidak tersalurkan dengan baik. Data BPS, 2019) menunjukkan bahwa lebih dari 56% rumah tangga petani termasuk kategori petani gurem, yakni hanya menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Keterbatasan luas lahan menjadi faktor kemiskinan struktural utama yang menyebabkan produktivitas dan pendapatan petani tetap rendah meskipun para petani telah bekerja keras setiap hari.

Clifford Geertz (1963) dalam bukunya yang berjudul *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change* menjelaskan konsep ‘involusi pertanian’ yang

serupa dengan kondisi pertanian di Indonesia. Geertz menyatakan bahwa ketika jumlah petani bertambah sementara lahan pertanian tidak berkembang, maka yang terjadi adalah peningkatan intensitas kerja di lahan yang sama tanpa menghasilkan kenaikan produktivitas yang signifikan. Akibatnya, muncul fenomena *shared poverty* atau kemiskinan yang terbagi rata di antara petani. Inilah realitas yang masih dirasakan sampai sekarang, meskipun bertambahnya jumlah tenaga kerja di desa tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan.

Kemiskinan struktural di Indonesia sering terjadi karena ketidakadilan sistemik yang berakar dari permasalahan kebijakan agraria yang belum berpihak pada petani kecil, terutama petani gurem. Kebijakan agraria selama ini cenderung gagal dalam memastikan redistribusi lahan secara adil dan berkelanjutan, sehingga menyebabkan luas lahan usaha tani semakin menyempit dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup petani (Susilowati & Maulana, 2012). Perluasan kawasan industri dan perkebunan besar yang tidak diimbangi kebijakan reforma agraria yang efektif justru hanya akan menambah jumlah petani gurem yang terpinggirkan dan memperburuk ketimpangan distribusi lahan. Ketimpangan distribusi lahan dan kegagalan penerapan reformasi agraria menyebabkan petani kecil dan gurem tidak mendapatkan titik tolak yang sama untuk mencapai kesejahteraan, melainkan harus keluar dari bidang pertanian dan mencari pekerjaan lain di luar dari bidang pertanian. Kebijakan yang tidak responsif dan tidak memperhatikan permasalahan petani gurem akan memperlambat upaya pengentasan kemiskinan struktural dan justru memperparah ketidakadilan sosial-ekonomi di kalangan petani gurem di Indonesia.

Semenjak Orde Baru, transformasi ekonomi Indonesia yang mengarah pada industrialisasi semakin mencekik keadaan para petani. Pertumbuhan industri dan urbanisasi mengakibatkan alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur secara besar-besaran. Dalam data Statistik Sektorial Kabupaten Karawang (2020) mencatat penurunan luas lahan sawah irigasi dari sekitar 97 ribu hektar pada tahun 2000 menjadi hanya 84 ribu hektar pada 2018. Penurunan

luas lahan ini berdampak pada produksi padi dan juga mempersempit lahan para petani untuk mencari nafkah.

Fenomena alih fungsi lahan mengakibatkan dua implikasi. Pertama, produksi pangan nasional yang berkurang berdampak pada Indonesia yang semakin bergantung pada impor beras. Kedua, semakin terdesaknya petani kecil karena kehilangan lahan garapan. Banyak para petani yang akhirnya hanya menjadi buruh tani atau beralih ke pekerjaan non-pertanian dengan upah rendah. Situasi ini menggambarkan proses proletarisasi dalam konteks agraria, yaitu petani tidak memiliki wewenang terhadap tanahnya dan hanya menjual tenaga kerjanya.

Kemiskinan struktural merujuk pada kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik yang sistematis, bukan hanya faktor individu seperti kemalasan atau kurangnya pendidikan. Struktur ini menciptakan hambatan sistemik yang membuat kelompok tertentu tetap miskin, seperti akses terbatas ke sumber daya, ketidakadilan distribusi kekayaan, dan kebijakan yang tidak mendukung. Berdasarkan penelitian terdahulu, kemiskinan struktural terjadi karena kombinasi faktor seperti ketimpangan akses lahan, ketergantungan pada pasar global yang tidak stabil, dan kebijakan ekonomi yang memprioritaskan pertumbuhan kapitalis daripada redistribusi.

Selain persoalan ekonomi, faktor sosial juga turut memperkuat kemiskinan struktural. Pendidikan para petani umumnya masih rendah karena keterbatasan biaya. Pendidikan yang tidak memadai berimplikasi pada sedikit peluang mobilitas sosial para petani ke sektor pekerjaan yang lebih baik. Kemiskinan petani seringkali bersifat antargenerasi, yaitu orang tua yang miskin mewariskan kondisi kemiskinan kepada anak-anaknya. Situasi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan petani di Indonesia bukan sekedar persoalan individu yang malas bekerja atau tidak produktif, tetapi karena struktur yang tidak merata, seperti penguasaan lahan yang sempit, alih fungsi lahan, kebijakan yang tidak berpihak, dan rantai pasok yang tidak adil. Inilah yang

dimaksud dengan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diciptakan dan dipelihara oleh sistem sosial, ekonomi, dan politik.

Penelitian oleh Yacoub & Mutiaradina (2020) mengenai kemiskinan petani dan kesejahteraan pedesaan di Indonesia menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk 32 provinsi selama periode 2009-2019. Dari penelitiannya, rendahnya upah riil buruh tani secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan di pedesaan. Upah riil yang rendah dari pekerjaan tani tidak mampu menutupi biaya hidup yang terus meningkat, sehingga kondisi ekonomi keluarga petani berada pada posisi yang riskan dan lemah. Ini menandakan faktor kritis yang menentukan keberlangsungan hidup dan kemampuan para keluarga petani untuk keluar dari kondisi kemiskinan.

Rendahnya produktivitas pertanian dan tingkat pendidikan petani juga menjadi indikator penyebab kemiskinan struktural yang dialami oleh para petani. Pendidikan yang rendah membuat kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi pertanian modern dan memperbaiki teknik produksi menjadi terbatas sehingga hasil tani dan penghasilan tidak maksimal. Dengan produktivitas yang terbatas dan akses yang kurang terhadap fasilitas pendukung, petani sulit untuk berinovasi dan meningkatkan perekonomian keluarganya.

Menurut Anisah et al. (2021), kemiskinan struktural pada petani gurem merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyempitan lahan, keterbatasan modal dan akses sumber daya, dan kebijakan agraria yang belum mampu memenuhi kebutuhan petani gurem. Pertama, penyempitan lahan pertanian akibat adanya alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan industri atau non-pertanian sehingga luas lahan yang dimiliki atau dikelola petani gurem sangat terbatas, yaitu kurang dari 0,5 hektar. Hal ini menyebabkan produktivitas usaha tani rendah dan pendapatan petani tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Petani gurem

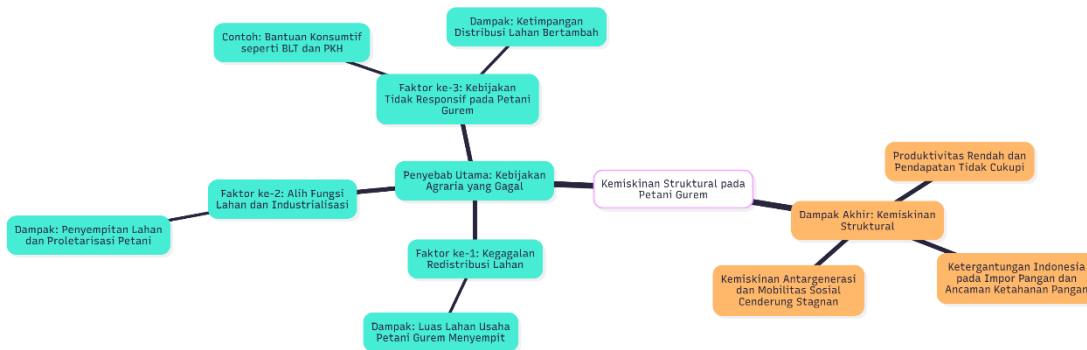
seringkali harus menyewa lahan tambahan atau bahkan bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Kedua, ketidakmampuan akses modal dan tingginya biaya produksi, seperti bunga pinjaman yang besar dan harga kebutuhan produksi yang naik, memperburuk kondisi kesejahteraan petani gurem. Ketiga, keterbatasan pendidikan dan keterampilan mempengaruhi kemampuan petani dalam mengembangkan usaha pertanian atau mencari alternatif penghasilan lain. Lingkungan pasar yang kurang mendukung seperti rendahnya harga komoditas dan praktik tengkulak yang merugikan juga menjadi faktor kemiskinan struktural bisa terjadi. Pemerintah daerah juga sering kali memberikan bantuan sosial yang sifatnya konsumtif (seperti BLT dan PKH) tidak bisa mengatasi masalah struktural seperti ketimpangan penguasaan lahan dan akses modal.

Akses modal petani gurem cenderung hanya pada lembaga keuangan formal seperti Bank dan BPR karena keterbatasan jaminan dan modal usaha yang kecil. Sebagian besar petani gurem mengandalkan modal sendiri dan pinjaman dari tengkulak, pedagang saprota, atau penggilingan padi dengan bunga yang tinggi. Hal ini menambah beban biaya produksi mereka dan risiko gagal bayar. Program kredit formal yang tersedia bagi petani gurem seperti kredit mikro dari Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih terbatas karena dana yang dialokasikan kurang memadai dan jumlah penerima dibatasi, sehingga tidak semua petani gurem mendapatkan manfaatnya (Supriatna, 2023).

Dari sisi kebijakan agraria, kegagalan melakukan reforma agraria yang efektif dan pengelolaan sumber daya agraria yang tidak merata memperparah situasi. Petani gurem sulit mendapatkan kepastian hukum atas lahan, sehingga rentan terhadap penguasaan oleh pihak lain. Hal ini secara bertahap membentuk lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, yang sejalan dengan penurunan produktivitas sektor pertanian nasional. Masih dalam penelitian (Anisah et al., 2021), di Kabupaten Gresik, data menunjukkan peningkatan jumlah petani gurem yang menghadapi masalah perubahan

fungsi lahan yang masif menyebabkan penyusutan sektor pertanian yang produktif. Hal ini mengakibatkan petani gurem tetap berada pada taraf kesejahteraan yang rendah dan eksistensi mereka semakin terancam.



Gambar 1. Diagram Kaitan antara Kemiskinan Struktural, Kebijakan Agraria, dan Petani Gurem

Diagram pohon diatas menunjukkan kaitan antara kemiskinan structural, kebijakan agrarian, dan petani gurem. Sebagaimana masalah utamanya adalah kemiskinan struktural pada petani gurem, yaitu kondisi kemiskinan yang bukan disebabkan oleh faktor individu, melainkan oleh struktur kebijakan dan sistem sosial-ekonomi yang tidak adil terhadap petani kecil. Akar dari masalah ini berasal dari kebijakan agraria yang gagal yang terbagi menjadi tiga faktor utama, yaitu kegagalan redistribusi lahan, alih fungsi lahan dan industrialisasi, serta kebijakan yang tidak responsif terhadap petani gurem.

Kegagalan redistribusi lahan menyebabkan petani gurem hanya memiliki lahan sempit (kurang dari 0,5 hektar) yang berdampak pada pendapatan mereka dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri mengakibatkan penyempitan lahan dan mendorong terjadinya proletarisasi petani, yakni perubahan posisi petani menjadi buruh tani atau pekerja tanpa lahan. Kebijakan publik yang tidak responsif (seperti program bantuan konsumtif (BLT, PKH)) tanpa adanya solusi peningkatan produktivitas justru akan

memperparah ketimpangan karena tidak memperhatikan permasalahan distribusi lahan dan akses modal.

Dari semua faktor penyebab tersebut, dampak akhirnya adalah kemiskinan struktural pada para petani gurem yang menimbulkan berbagai permasalahan. Pertama, produktivitas pertanian menurun dan pendapatan petani tidak mencukupi. Kedua, kemiskinan antargenerasi terus berlanjut, membuat mobilitas sosial petani stagnan. Ketiga, kondisi ini memicu ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dan melemahkan ketahanan pangan nasional. Kemiskinan petani di Indonesia bersifat struktural bukan karena ulah faktor individu seperti kemalasan atau kurangnya usaha. Kondisi ini merupakan hasil dari struktur sosial-ekonomi yang timpang, termasuk penguasaan lahan yang tidak merata, keterbatasan akses pasar dan modal, rendahnya pendidikan, dan kebijakan yang tidak benar-benar berpihak pada para petani.

Kebijakan pengentasan kemiskinan petani seharusnya dirancang secara menyeluruh dan mendalam. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani dengan kebijakan yang berpihak pada petani, maka masa depan ketahanan pangan Indonesia akan terancam. Petani yang semakin terpinggirkan tidak akan mampu lagi menyediakan pangan bagi bangsa, dan Indonesia akan semakin bergantung pada impor. Pemerintah seharusnya turun ke lapangan untuk melihat fakta bagaimana kehidupan para petani dan apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas pertanian dan kehidupan para petani. Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan subsidi atau bantuan finansial semata, tetapi juga meningkatkan pendidikan, akses teknologi, serta memperbaiki struktur pasar agar petani mendapatkan harga yang adil dan stabil. Program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan petani perlu diprioritaskan agar mereka mampu keluar dari lingkaran kemiskinan antargenerasi.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa kemiskinan masih menjadi masalah yang banyak dialami oleh petani di Indonesia meskipun sudah ada kebijakan pemerintah yang diterapkan?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan dan kesejahteraan petani gurem di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan di kalangan petani di Indonesia.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan pada petani kecil terutama petani gurem.
3. Mengkaji dampak dari kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan petani.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan sektor publik, khususnya dalam memahami hubungan antara kebijakan publik, ketimpangan sosial, dan kemiskinan struktural di sektor pertanian. Penelitian ini memperluas pandangan bahwa kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh faktor individu seperti rendahnya produktivitas, tetapi juga merupakan hasil dari struktur kebijakan dan keputusan pemerintah yang tidak berpihak pada kelompok rentan, seperti petani gurem.

Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan agraria dan menaungi seluruh petani di Indonesia lebih adil dan menyeluruh. Dengan mengidentifikasi akar penyebab kemiskinan

struktural, hasil penelitian ini dapat membantu merancang kebijakan yang dapat diterapkan seperti kebijakan yang dapat membangun seperti redistribusi lahan, peningkatan akses modal, dan mengurangi ahli fungsi lahan para petani gurem, bukan sekadar bantuan konsumtif saja. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh organisasi Masyarakat sebagai dasar dalam mendorong perubahan kebijakan agraria yang lebih berpihak pada petani, terlebih petani gurem.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan kerangka penting dalam sebuah penelitian untuk membantu memetakan perkembangan pengetahuan dan memberikan gambaran dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Terdahulu bertujuan untuk menyajikan rangkuman dan analisis kritis terhadap sejumlah studi yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Rangkuman tersebut meliputi aspek-aspek konseptual, temuan empiris, serta metode penelitian yang digunakan. Dengan penelitian terdahulu, peneliti memperoleh gambaran mengenai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kesejahteraan petani gurem dan menganalisis kemiskinan structural, sekaligus menganalisis kekuatan dan kelemahan dari penelitian-penelitian terdahulu.

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendukung pemahaman terhadap materi yang dikaji, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mengidentifikasi kekurangan, kekosongan, atau aspek yang belum tersentuh dalam literatur yang ada, yang biasa dikenal sebagai *research gap*. Dengan mengenali celah ini, peneliti dapat merumuskan tujuan dan fokus penelitian yang lebih spesifik dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Salmaa (2022) menjelaskan bahwa penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan hasilnya digunakan sebagai pembanding dan sumber inspirasi untuk mengembangkan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Melalui pemahaman terhadap penelitian-penelitian yang relevan, peneliti dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan studi terdahulu serta menemukan celah penelitian (*research gap*) yang menjadi landasan penting bagi studi yang sedang dijalankan. Sugiyono (dikutip di (Salmaa, 2022)) penelitian terdahulu yang dimuat

dalam tinjauan pustaka berfungsi sebagai seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang membantu peneliti memahami fenomena secara sistematis dan membangun hubungan yang logis antar variabel. Penelitian terdahulu menjadi pijakan teoretis dan metodologis yang memandu pelaksanaan penelitian serta menjamin orisinalitas dan validitas kajian ilmiah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kata kunci Petani Gurem, Kebijakan Struktural, Kebijakan Pemerintah, Kesejahteraan, Kemiskinan Struktural, Indonesia. Dari kata kunci tersebut, penulis berhasil menemukan penelitian terdahulu dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Dalam pencarian penelitian terdahulu, penulis mendapati bahwa sedikit yang membahas tentang kebijakan pemerintan terhadap petani gurem, sehingga penulis menganalisis dari topik dan kata kunci tersebut. Beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut.

Pertama, penelitian oleh Arif (2017) yang berjudul “*Identifikasi Dan Klasifikasi Kemiskinan Petani Perkotaan (Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan)*” menguraikan tentang kondisi kemiskinan yang dialami petani perkotaan di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan dengan fokus pada keterbatasan sumber daya alam dan manusia yang menyebabkan kemiskinan natural. Lahan sempit dan keterbatasan modal usaha menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan petani, meskipun sebagian besar masih memiliki hak kepemilikan lahan dan rumah pribadi. Pendidikan formal yang rendah serta jumlah tanggungan keluarga yang besar turut memperberat kondisi ekonomi petani, yang berdampak pada pendapatan rendah dan kualitas hidup yang tidak memadai. Hal ini mencerminkan adanya masalah kemiskinan struktural yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang belum optimal dalam menjangkau dan memberdayakan petani gurem, sehingga ketimpangan kesejahteraan masih terjadi di lingkungan perkotaan Indonesia.

Kedua, Penelitian oleh Assan (2019) yang berjudul “*Strategi Bertahan Hidup Petani Gurem Di Desa Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat*” membahas tentang strategi bertahan hidup petani gurem yang menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan risiko gagal panen. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini menunjukkan bahwa petani gurem menjalankan berbagai strategi, seperti mencari pekerjaan tambahan, mengajak anggota keluarga bekerja, menerapkan pola hidup hemat, dan memanfaatkan jaringan sosial formal maupun informal sebagai sumber bantuan. Petani gurem yang memiliki lahan kurang dari satu hektar ini cenderung mengutamakan keselamatan usaha dengan meminimalkan risiko kegagalan, sehingga lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan bertani dan sulit berinovasi. Kondisi ini berujung pada usaha bertani yang minim sehingga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan mereka sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan kebijakan pertanian yang kurang berpihak.

Ketiga, Penelitian oleh Anisah et al., (2021) yang berjudul “*Eksistensi Petani Gurem Di Kabupaten Gresik*” menunjukkan bahwa petani gurem masih eksis dengan kesejahteraan yang rendah, didominasi oleh petani berpendidikan rendah dan berusia antara 55-65 tahun. Faktor-faktor tersebut secara signifikan memengaruhi jumlah petani gurem, sementara tren alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri menimbulkan tekanan pada kelangsungan pertanian dan kesejahteraan petani gurem. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya intervensi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani gurem sekaligus menjaga keberlanjutan pertanian di Kabupaten Gresik demi mendukung ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

Keempat, Penelitian oleh Nirwana (2017) yang berjudul “*Deskripsi Sosial Ekonomi Keluarga Petani Gurem di Desa Sidosari Kecamatan Natar*” memperlihatkan bahwa keterbatasan lahan garapan dengan hanya sekitar 0,17 hektar berimplikasi langsung pada rendahnya pendapatan rumah tangga, sehingga sebagian besar tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum. Meski ada kebijakan pemerintah melalui program peningkatan produktivitas dan kelembagaan pertanian, kenyataannya

masih banyak keluarga petani yang tetap berada dalam kategori miskin atau miskin sekali, dengan ketergantungan pada pekerjaan tambahan seperti buruh bangunan atau pedagang kecil. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi petani gurem bukan hanya persoalan individu, melainkan bagian dari kemiskinan yang bersifat struktural.

Dari keempat penelitian terdahulu yang telah dianalisis dan ditelaah, masing-masing memberikan dan menambah wawasan. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan studi terdahulu serta menemukan celah penelitian (*research gap*) yang menjadi arahan bagi penelitian yang sedang dijalankan.

Berikut adalah tabel perbandingan terdahulu:

Penulis	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Andreas Assan	<i>Strategi Bertahan Hidup Petani Gurem Di Desa Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat</i>	Bagaimana strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh keluarga petani gurem	Bentuk strategi yang digunakan yaitu strategi aktif (mencari pekerjaan sampingan, melibatkan anggota keluarga bekerja, memanfaatkan sumber daya), strategi pasif (hidup hemat, meminimalisir pengeluaran), dan strategi jaringan (memanfaatkan bantuan sosial, kerabat, atau jaringan formal-informal)
Arif	<i>Identifikasi Dan Klasifikasi Kemiskinan Petani Perkotaan (Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan)</i>	mengidentifikasi serta mengklasifikasi bentuk kemiskinan yang dialami petani perkotaan, serta menganalisis penyebab dan faktor yang mempengaruhi kemiskinan	Jenis kemiskinan yang dialami petani adalah kemiskinan natural, terutama akibat keterbatasan sumber daya alam dan manusia. Penyebab kemiskinan bersumber dari faktor internal (usia petani, jumlah tanggungan keluarga) dan faktor eksternal (status kepemilikan serta luas lahan, kepemilikan rumah, tingkat pendapatan, dan modal usaha). Faktor yang paling dominan mempengaruhi kemiskinan petani adalah sempitnya lahan garapan dan

			keterbatasan modal usaha, sehingga sulit untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan mereka
Anisah, dkk	<i>Eksistensi Petani Gurem di Kabupaten Gresik</i>	Eksistensi petani gurem di Kabupaten Gresik serta faktor-faktor yang memengaruhi jumlah petani gurem. Memahami keberadaan petani gurem dan meninjau variabel-variabel yang mempengaruhi peningkatan jumlah petani gurem, seperti luas lahan, harga komoditas, usia, tingkat pendidikan, dan jumlah anggota keluarga.	Eksistensi petani gurem di Kabupaten Gresik masih ada dan terus berlanjut meskipun di tengah pandemi. Mayoritas petani gurem memiliki pendidikan setara SD dan berusia antara 55-65 tahun dan hal ini menjadi salah satu faktor berlanjutnya keberadaan petani gurem dengan taraf kesejahteraan yang rendah. Analisis regresi linier berganda mengungkapkan bahwa variabel luas lahan, harga komoditas, umur (khususnya usia 55-65 tahun), pendidikan SD, dan jumlah anggota keluarga (3-5 orang) berpengaruh signifikan terhadap jumlah petani gurem di Kabupaten Gresik. Penelitian juga menyoroti penyempitan lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi kawasan industri, yang berdampak pada kesejahteraan petani gurem dan kelangsungan pertanian di wilayah tersebut. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah tepat untuk meningkatkan

			kesejahteraan petani gurem dan menjaga keberlanjutan kegiatan pertanian di Kabupaten Gresik.
Nita Nirwana	<i>Deskripsi Sosial Ekonomi Keluarga Petani Gurem di Desa Sidosari Kecamatan Natar</i>	kondisi sosial ekonomi keluarga petani gurem (kepemilikan lahan, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan tambahan, pendapatan, dan sejauh mana kebutuhan pokok minimum dapat terpenuhi)	Rata-rata luas lahan yang dimiliki petani gurem hanya sekitar 0,17 hektar per keluarga dengan rata-rata jumlah anak 3 orang dan mayoritas kepala keluarga hanya di jenjang SD. Sebagian besar petani memiliki pekerjaan tambahan, terutama sebagai buruh bangunan, pedagang, atau buruh tani. Total pendapatan keluarga petani gurem rata-rata Rp 11,6 juta per tahun, namun tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum masih rendah. Berdasarkan klasifikasi, 29,74% keluarga tergolong miskin sekali, 59,45% miskin, dan 10,81% hampir miskin.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

2.2 LANDASAN TEORI

Di Indonesia, kesejahteraan petani gurem masih belum diperhatikan. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan agraria, pertanian, dan sosial yang benar-benar memperhatikan kebutuhan dasar kelompok masyarakat yang paling rentan. Tetapi kenyataan di lapangan, keberadaan petani gurem yang masih terjebak dalam kemiskinan struktural mencerminkan adanya kesenjangan dalam implementasi nilai kesejahteraan yang seharusnya menjadi perlindungan melalui kebijakan pemerintah.

Dalam administrasi publik, teori menjadi pijakan penting untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Teori dalam administrasi publik dapat diklasifikasikan ke dalam tiga macam, yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*.

2.2.1 GRAND THEORY: Teori Konflik oleh Karl Max

Kemiskinan yang dialami oleh petani gurem di Indonesia tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai akibat dari kemalasan atau kurangnya keterampilan individu. Fenomena ini merupakan manifestasi dari ketimpangan struktural yang mengakar dalam sistem sosial-ekonomi masyarakat. Untuk memahami akar permasalahan ini secara komprehensif, penelitian ini menggunakan Teori Konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx sebagai *grand theory* atau kerangka teoretis makro.

Marx (1867) dalam karya monumentalnya "Das Kapital" menjelaskan bahwa masyarakat kapitalis pada dasarnya terbagi menjadi dua kelas utama yang memiliki kepentingan yang bertentangan: kelas borjuis yang memiliki alat-alat produksi dan kelas proletar yang hanya memiliki tenaga kerja untuk dijual. Dalam konteks agraria, ketimpangan ini terwujud dalam penguasaan tanah yang tidak merata, di mana segelintir pihak menguasai lahan luas dan produktif, sementara mayoritas petani hanya memiliki atau menggarap lahan yang sangat sempit. Marx menekankan bahwa kemiskinan bukanlah kondisi

alamiah atau takdir, melainkan hasil dari struktur ekonomi politik yang eksploitatif dan relasi produksi yang tidak adil. Ketimpangan ini bukan sekadar perbedaan kuantitatif dalam kepemilikan aset, tetapi mencerminkan relasi kekuasaan yang asimetris dalam proses produksi dan distribusi surplus ekonomi.

Ritzer (2012) dalam bukunya "Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern" menjelaskan bahwa teori konflik Marx menekankan peran struktur ekonomi sebagai basis material yang menentukan superstruktur politik, hukum, dan ideologi dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, struktur agraria yang timpang merupakan warisan dari kebijakan kolonial Belanda yang melanggengkan penguasaan tanah oleh elite tertentu. *Cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa yang diberlakukan pada tahun 1830 tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pemerintah kolonial, tetapi juga menciptakan struktur sosial yang menempatkan petani pada posisi yang sangat lemah dan bergantung. Kebijakan ini memaksa petani untuk menyerahkan sebagian lahan dan tenaga kerjanya untuk menanam komoditas ekspor, yang mengakibatkan kelangkaan pangan dan penderitaan massal di kalangan petani pribumi.

Agrarische Wet 1870 yang dimaksudkan sebagai reformasi justru memperkenalkan asas *domein verklaring* yang menyatakan bahwa tanah tanpa bukti kepemilikan tertulis dianggap milik negara dan dapat disewakan kepada investor asing untuk jangka waktu yang panjang. Wolf (1966) dalam "*Peasants*" menjelaskan bahwa kebijakan agraria kolonial seperti ini menciptakan "*peasantry*" atau kelas petani yang terasing dari tanah mereka yang seharusnya menjadi alat utama dalam pekerjaan mereka. Petani tidak lagi menjadi tuan atas tanahnya sendiri, melainkan berubah menjadi penggarap atau buruh tani yang bekerja untuk kepentingan pihak lain. Proses ini yang oleh Marx disebut sebagai "*primitive accumulation*" atau akumulasi primitif, yaitu

proses pemisahan paksa antara produsen dan alat-alat produksi mereka, yang menjadi prasyarat bagi berkembangnya kapitalisme.

Geertz (1963) memberikan perspektif khusus tentang kondisi pertanian di Jawa yang ia sebut sebagai "involusi pertanian". Geertz mengamati bahwa ketika jumlah penduduk petani terus bertambah sementara luas lahan pertanian tetap atau bahkan berkurang, yang terjadi bukanlah inovasi teknologi atau ekspansi ekonomi, melainkan intensifikasi kerja yang berlebihan pada lahan yang sama. Petani terpaksa membagi-bagi lahan yang sudah sempit kepada lebih banyak orang, sehingga masing-masing keluarga petani hanya memiliki atau menggarap lahan yang sangat kecil. Fenomena ini menghasilkan apa yang Geertz sebut sebagai "*shared poverty*" atau kemiskinan yang terbagi rata, di mana semua orang bekerja keras tetapi hasilnya hanya cukup untuk bertahan hidup pada tingkat subsisten.

2.2.2 MIDDLE THEORY: Teori *Policy Failure Theory*

Mueller (2020) mengemukakan bahwa kegagalan kebijakan publik biasanya disebabkan oleh kompleksitas sistem sosial yang tidak diperhitungkan oleh pembuat kebijakan. Pendekatan tradisional dalam pembuatan kebijakan cenderung bersifat linear dan reduksionis, berasumsi bahwa masalah dapat dianalisis secara terpisah-pisah dan solusi dapat diterapkan secara mekanis dengan hasil yang dapat diprediksi. Namun, realitas sosial jauh lebih kompleks, di mana berbagai elemen saling berinteraksi dalam cara-cara yang tidak terduga dan menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Mueller mengatakan "*Public policy fails so often when it is beset with so many obstacles in complex systems, and policy fails when complex problems are addressed using standard linear and reductionist approaches that presuppose more knowledge and control than possible in such situations*".

Mueller mengidentifikasi lima karakteristik sistem kompleks yang menjadi penyebab utama kegagalan kebijakan publik. Pertama adalah non-

linearity, yaitu hubungan sebab-akibat yang tidak proporsional dan tidak dapat diprediksi secara sederhana. Dalam konteks kebijakan agraria di Indonesia, contoh nyata dari *non-linearity* adalah kebijakan impor beras. Kebijakan ini dirancang dengan tujuan baik untuk menstabilkan harga beras bagi konsumen dan menjaga ketersediaan pangan nasional. Namun, dampaknya terhadap petani gurem ternyata jauh lebih kompleks dan merugikan. Ketika beras impor yang murah membanjiri pasar domestik, harga gabah di tingkat petani anjlok drastis. Penurunan harga ini tidak berbanding lurus dengan volume impor, karena ada efek psikologis pasar dan spekulasi tengkulak yang memperparah situasi. Petani gurem yang sudah memiliki margin keuntungan sangat tipis menjadi semakin tertekan, bahkan seringkali harga jual gabah tidak mampu menutupi biaya produksi. Dampak jangka panjangnya adalah petani gurem kehilangan insentif untuk terus bertani, lahan ditinggalkan atau dialihfungsikan, dan terjadi eksodus dari sektor pertanian.

Karakteristik kedua adalah *emergence*, yaitu munculnya fenomena baru yang tidak dapat diprediksi dari sifat-sifat komponen individual sistem. Dalam kasus kebijakan alih fungsi lahan di Indonesia, pemerintah daerah memberikan izin konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri dengan harapan dapat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, yang muncul kemudian adalah fenomena proletarianisasi petani secara massal, di mana petani yang kehilangan lahan tidak serta-merta menjadi buruh industri yang sejahtera, melainkan menjadi pekerja informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Lebih jauh lagi, muncul masalah-masalah sosial baru seperti ketimpangan ekonomi yang semakin tajam antara pemilik lahan yang mendapat kompensasi besar dengan petani penggarap yang tidak mendapat apa-apa, fragmentasi sosial di masyarakat desa, dan degradasi lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkendali.

Karakteristik ketiga yang dijelaskan Mueller adalah *path dependence*, yaitu keterikatan kebijakan pada keputusan-keputusan masa lalu yang

membatasi ruang kebijakan saat ini. Di Indonesia, *path dependence* sangat terlihat dalam warisan kebijakan kolonial Belanda. Asas *domein verklaring* yang diperkenalkan melalui Agrarische Wet 1870 yang menyatakan bahwa tanah tanpa bukti kepemilikan tertulis adalah milik negara, masih memengaruhi kebijakan pertanahan hingga saat ini. Banyak petani yang telah menggarap lahan secara turun-temurun namun tidak memiliki sertifikat hak milik, sehingga rentan terhadap penggusuran ketika ada proyek pembangunan atau klaim kepemilikan dari pihak lain. Upaya reforma agraria yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengalami hambatan besar karena struktur penguasaan lahan yang timpang sudah terlanjur terbentuk dan dilindungi oleh berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang kuat.

2.2.3 APPLIED THEORY: Teori New Public Service (NPS)

Denhardt dan Denhardt (2000) menawarkan paradigma baru dalam administrasi publik yang berbeda secara fundamental dari paradigma sebelumnya. New Public Service menawarkan tujuh prinsip kunci yang sangat relevan untuk mengatasi kemiskinan struktural petani gurem di Indonesia. Prinsip pertama adalah "*serve citizens, not customers*". Denhardt dan Denhardt (2003) menjelaskan bahwa "*customer*" dalam New Public Management mereduksi hubungan antara negara dan masyarakat menjadi transaksi ekonomi yang bersifat individual dan jangka pendek. Warga negara bukan sekadar konsumen yang membeli layanan, melainkan warga yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks petani gurem, ini berarti pemerintah tidak boleh hanya memperlakukan petani sebagai penerima bantuan atau objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk terlibat dalam perumusan kebijakan agrarian dan evaluasi implementasi kebijakan.

Prinsip kedua adalah "*seek the public interest*" atau mengutamakan kepentingan publik. Dalam kebijakan agraria, kepentingan publik mencakup

ketahanan pangan nasional, keadilan sosial dalam distribusi sumber daya, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat petani. Kebijakan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi agregat atau kepentingan investor tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap petani gurem dan ketahanan pangan jangka panjang tidak dapat dikatakan mengutamakan kepentingan publik. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada dan membuat keputusan yang mengutamakan kebaikan bersama, bukan hanya kepentingan kelompok yang paling berpengaruh.

Prinsip ketiga adalah "*value citizenship over entrepreneurship*" atau menghargai kewarganegaraan lebih dari kewirausahaan. Denhardt dan Denhardt menekankan bahwa meskipun efisiensi dan inovasi ala sektor swasta penting, nilai-nilai demokratis seperti keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi tidak boleh dikorbankan demi efisiensi. Dalam konteks pertanian, logika pasar yang menekankan produktivitas dan kompetitivitas seringkali merugikan petani gurem yang tidak memiliki skala ekonomi untuk bersaing dengan agribisnis besar atau produk impor. Pendekatan entrepreneurial yang menekankan "*survival of the fittest*" atau siapa yang paling kuat akan bertahan, justru akan semakin memarginalkan petani gurem. Sebaliknya, pendekatan yang menghargai kewarganegaraan mengakui bahwa petani gurem memiliki hak asasi untuk hidup layak dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Prinsip keempat adalah "*serve rather than steer*". New Public Service menekankan peran pemerintah sebagai fasilitator, katalisator, dan pelayan yang membantu warga negara untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal petani gurem, pemerintah tidak boleh hanya mendikte apa yang harus dilakukan petani, melainkan harus mendengarkan kebutuhan petani, menyediakan berbagai opsi dan sumber daya, serta mendukung petani dalam membuat keputusan yang terbaik bagi mereka. Pendekatan ini sejalan dengan konsep

"*empowerment*" atau pemberdayaan yang menekankan penguatan kapasitas dan otonomi petani dan bukan ketergantungan pada instruksi pemerintah.

2.2.4 PETANI GUREM

Petani gurem adalah petani yang mengusahakan lahan pertanian dengan luas sangat kecil, yaitu kurang dari 0,5 hektar (BPS, 2023). Petani gurem biasanya memiliki sumber daya terbatas dan bergantung pada lahan sempit yang hanya mampu menghasilkan pendapatan minimum untuk menyambung hidup keluarga. Ciri khas petani gurem adalah orientasi usahanya yang lebih menekankan pada meminimalisir risiko kerugian atau gagal panen daripada mencari keuntungan besar. Sikap ini disebabkan ketidakpastian hasil dan ketergantungan besar pada hasil pertanian sebagai sumber penghidupan utama keluarga mereka. Mereka cenderung memilih pola tanam konvensional dan enggan mengambil risiko inovasi yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya.

2.2.5 KEMISKINAN STRUKTURAL

Menurut Selo Soemardjan (mengutip dalam Ahmad, 2022), kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial yang menghalangi mereka menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan kelompok miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi secara penuh. Kemiskinan Struktural adalah fenomena kemiskinan yang bersifat sistemik dan menyangkut akar penyebab yang ada dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Kemiskinan ini tidak hanya bersifat sementara atau akibat ketidakberuntungan individu, melainkan hasil ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan peluang ekonomi yang dipengaruhi oleh kebijakan dan struktur sosial yang ada.

2.2.6 KEBIJAKAN AGRARIA

Kebijakan agraria adalah serangkaian aturan, kebijakan, dan praktik yang mengatur kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya agraria seperti tanah, air, dan kekayaan alam lainnya. Di Indonesia, kebijakan agraria bertujuan menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, khususnya kaum tani. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah, memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah, dan mendukung pengembangan sumber daya agraria (Syahputra, 2023).

2.2.7 KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan adalah kondisi di mana individu atau kelompok memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh penghasilan yang layak, layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, serta memiliki kesempatan yang merata untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam konteks petani gurem, kesejahteraan diukur berdasarkan kemampuan mereka untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan standar hidup sehingga dapat keluar dari kemiskinan.

2.3 KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir penelitian ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara kebijakan agraria pemerintah dengan kemiskinan struktural yang dialami oleh petani gurem di Indonesia. Petani gurem merupakan petani dengan lahan sangat terbatas kurang dari 0,5 hektar yang mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya produksi, teknologi, dan pasar sehingga rentan terhadap kemiskinan struktural (BPS, 2023). Menurut Selo Soemardjan (mengutip dalam Ahmad, 2022), kemiskinan struktural bukanlah hasil dari kelemahan individu, melainkan akibat ketidakadilan dalam distribusi sumber daya yang membuat kelompok miskin tidak mampu mengakses peluang ekonomi.

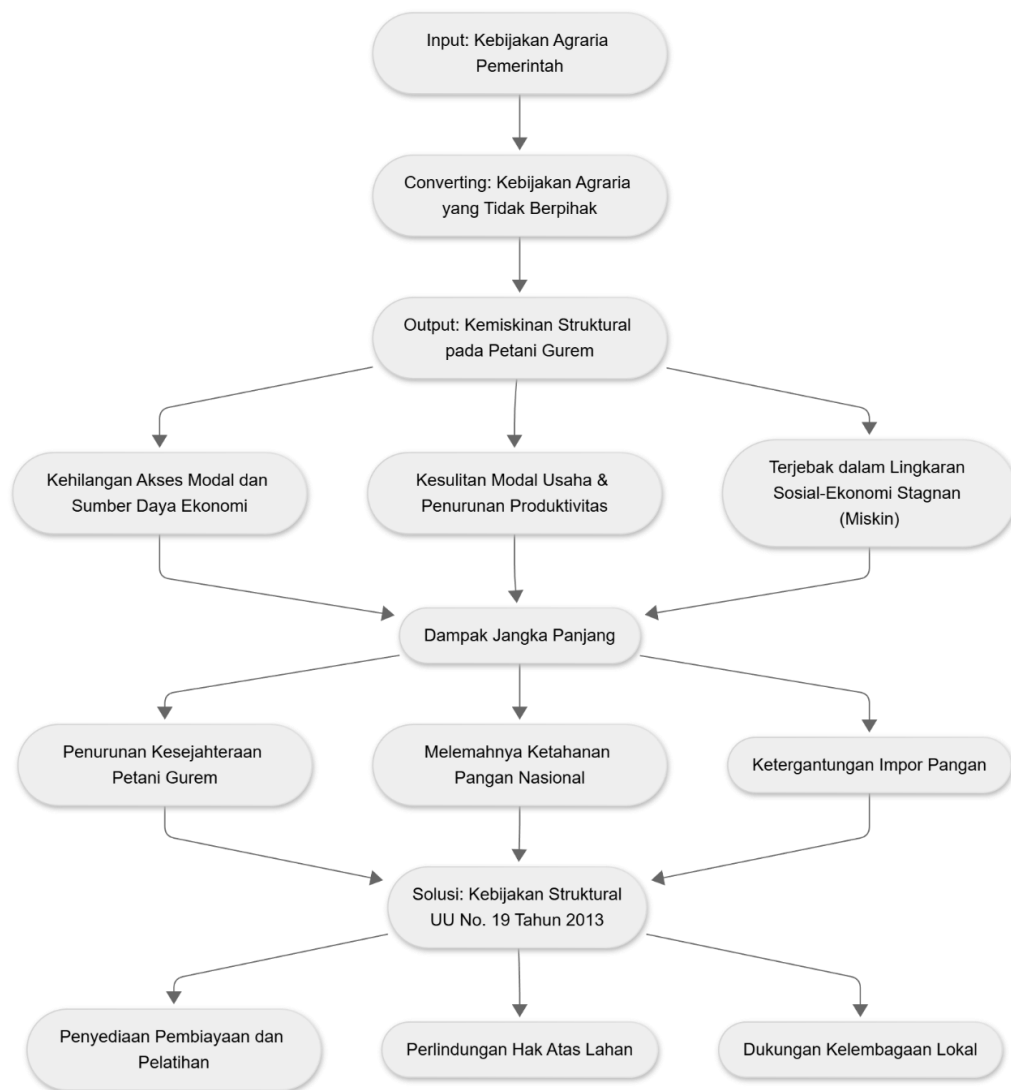
Masalah utama yang diangkat adalah kemiskinan struktural. Kebijakan agraria yang semestinya berfungsi menciptakan pemerataan kepemilikan lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani justru sering kali gagal diimplementasikan. Kegagalan tersebut tampak dalam tiga aspek utama, yaitu:

1. Kegagalan redistribusi lahan yang menyebabkan banyak petani hanya memiliki lahan sempit (kurang dari 0,5 hektar)
2. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan yang mempersempit ruang hidup petani
3. Kebijakan pemerintah yang tidak responsif terhadap kebutuhan petani gurem, karena lebih menekankan pada bantuan konsumtif (BLT, PKH) daripada pemberdayaan produktif.

Akibat dari kebijakan yang tidak berpihak tersebut, petani gurem kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi, kesulitan memperoleh modal usaha, serta mengalami penurunan produktivitas. Hal ini kemudian melahirkan kemiskinan struktural, di mana petani terjebak dalam sistem sosial-ekonomi yang tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki nasibnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat desa, melemahnya ketahanan pangan nasional, dan meningkatnya ketergantungan terhadap impor pangan.

Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan struktural yang fokus pada pemberdayaan petani gurem melalui penyediaan pembiayaan, pelatihan, perlindungan hak atas lahan, dan dukungan kelembagaan lokal, sesuai amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang ini yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan berkelanjutan di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai respons negara atas ketimpangan dan kerentanan petani dalam menghadapi perubahan iklim, risiko usaha, dan sistem pasar yang kurang berpihak kepada petani agar mereka mendapat keadilan sosial dan kemakmuran yang lebih baik.

Kebijakan ini harus dilakukan dengan prinsip administrasi publik yang responsif, transparan, dan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat agar petani gurem mampu memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh penghasilan yang layak, serta memiliki kesempatan untuk mobilitas sosial yang lebih baik. Kebijakan publik seharusnya berorientasi pada prinsip keadilan distributif, sehingga distribusi lahan dan sumber daya dapat lebih adil. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan kerangka pikir yang ada dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 TIPE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah *explanatory case study research* atau studi kasus eksplanatori. Dalam buku Metode Penelitian Kualitatif karya (Nasution, 2023) menjelaskan bahwa jika seseorang ingin memahami latar belakang suatu persoalan, interaksi individu dalam unit sosial, atau kelompok secara mendalam, menyeluruh, holistik, intensif, dan naturalistik. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap gambaran yang detail dan mendalam mengenai situasi atau objek yang diteliti. Objek penelitian kasus bisa berupa individu, keluarga, peristiwa, atau kelompok yang cukup terbatas sehingga peneliti dapat menghayati, memahami, dan mengerti bagaimana objek tersebut beroperasi atau berfungsi dalam lingkungan alami mereka.

Studi kasus eksplanatori merupakan penelitian yang menarik karena ia tidak sekadar mendeskripsikan fenomena, melainkan berusaha mengungkap misteri di baliknya dengan menjelaskan “mengapa” dan “bagaimana” suatu peristiwa atau kondisi terjadi dalam konteks nyata. Tipe ini sangat bergantung pada analisis kausal, di mana peneliti membangun narasi yang menghubungkan variabel-variabel kompleks. (Yin, 2014) dalam bukunya yang berjudul “*Case Study Research: Design and Methods*”, menjelaskan bahwa studi kasus eksplanatori ideal digunakan ketika penelitian bertujuan menjawab pertanyaan "mengapa" sesuatu terjadi.

Dalam penelitian ini, prosesnya dimulai dengan identifikasi fenomena yang ingin dijelaskan. Sharon Merriam (1998) dalam bukunya yang berjudul “*Qualitative Research and Case Study Applications in Education*”, menambahkan bahwa studi kasus eksplanatori melibatkan pembangunan narasi proses. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumen historis untuk membangun model kausal yang logis. Merriam menggambarkan tipe ini sebagai cerita yang hidup tentang bagaimana faktor-faktor seperti kebijakan yang tidak responsif

(seperti bantuan konsumtif BLT dan PKH yang tidak mengatasi akar masala) berinteraksi untuk menciptakan dampak jangka panjang, seperti kemiskinan antargenerasi pada petani gurem. Menurut Yin, kelebihan utama tipe ini adalah kemampuannya memberikan pemahaman mendalam tentang proses yang sulit diukur secara kuantitatif sehingga cocok untuk analisis kebijakan publik yang kompleks. Namun, kekurangan dari penelitian ini adalah beresiko interpretasi subjektif peneliti tetapi bisa diatasi dengan *peer review*.

3.2 FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian menurut (Sugiyono, 2017) adalah penetapan batasan yang akan diteliti sesuai dengan gejala atau fenomena yang menjadi fokus utama penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian difokuskan secara holistik pada situasi sosial yang mencakup tempat, pelaku, dan aktivitas, sehingga tidak dapat dipisahkan-pisahkan ke dalam variabel tertentu seperti pada penelitian kuantitatif. Penentuan fokus ini penting agar peneliti bisa membatasi kajian hanya pada aspek-aspek inti dari masalah yang ingin dipahami secara mendalam dan menyeluruh, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang mendalam terkait fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti. Pembatasan fokus juga membantu peneliti dalam menyesuaikan sumber daya, waktu, dan tenaga yang tersedia sehingga penelitian tetap efisien dan terarah.

Fokus penelitian ini ada pada satu aspek utama yaitu dampak kebijakan agraria terhadap kemiskinan struktural petani gurem. Penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana kebijakan agraria pemerintah Indonesia mempengaruhi kondisi kemiskinan struktural yang dialami oleh petani gurem. Fokus ini dipilih karena kebijakan agraria merupakan akar permasalahan dalam menentukan kesejahteraan petani terhadap sumber daya produktif. Untuk menganalisis dampak kebijakan agraria terhadap kemiskinan struktural petani gurem, penelitian ini menggunakan *Policy Failure Theory* yang dikemukakan oleh Mueller (2020). Teori ini dipilih karena relevan dengan

fenomena kegagalan kebijakan agraria di Indonesia yang tidak mampu mengentaskan kemiskinan struktural petani gurem meskipun berbagai program telah dilaksanakan.

Mueller (2020) menjelaskan bahwa kegagalan kebijakan publik seringkali disebabkan oleh kompleksitas sistem yang tidak diperhitungkan oleh pembuat kebijakan. Teori ini mengidentifikasi lima karakteristik sistem kompleks yang menyebabkan kebijakan gagal:

1. *Non-linearity*, yaitu kebijakan menghasilkan dampak yang tidak proporsional dan sulit diprediksi,
2. *Emergence*, adalah kemunculan fenomena baru yang tidak terduga dari interaksi berbagai faktor,
3. *Path dependence*, dengan kata lain kebijakan terikat pada keputusan masa lalu,
4. *Feedback loops*, adanya umpan balik yang dapat memperkuat atau melemahkan efek kebijakan,
5. *Adaptation* atau perilaku masyarakat yang berubah sebagai respons terhadap kebijakan.

Dalam konteks kebijakan agraria dan petani gurem di Indonesia, teori ini sangat relevan karena kebijakan redistribusi lahan (reforma agraria) telah dirancang sejak era kemerdekaan namun gagal diimplementasikan secara efektif karena kompleksitas kepentingan politik dan ekonomi, kebijakan subsidi pupuk yang bias kepada petani besar menunjukkan adanya *feedback loops* yang memperburuk ketimpangan, dan warisan kebijakan kolonial (Cultuurstelsel, Agrarische Wet 1870) menciptakan *path dependence* yang membuat struktur agraria timpang hingga saat ini.

Penelitian ini sengaja membatasi fokus dan cakupan analisis sesuai dengan *Policy Failure Theory* mengacu pada pendekatan Mueller (2020). Subjek penelitian dibatasi pada petani gurem (petani yang memiliki atau menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar (BPS, 2023)). Aspek kebijakan yang dikaji secara khusus meliputi kebijakan

agraria yang berkaitan dengan penguasaan lahan, alih fungsi lahan, dinamika harga dan perdagangan pangan, serta mekanisme subsidi pertanian. Batasan temporal penelitian dipilih sejak masa pasca-reformasi (1998-2025) agar analisis mencakup kebijakan terkini sekaligus mempertimbangkan warisan historis dari kebijakan kolonial sebagai bentuk *path dependence* yang memengaruhi struktur agraria saat ini. Secara geografis, penelitian menggunakan data dan kasus representatif dari berbagai wilayah Indonesia agar mampu merefleksikan keragaman dan pola kegagalan kebijakan di level lokal maupun nasional. Penelitian berfokus pada *Policy Failure Theory* Mueller, yakni menelaah bagaimana faktor desain, tata kelola, atau kompleksitas sosial ekonomi berujung pada kegagalan substantif kebijakan agraria, bukan sekadar menilai efektivitas teknis implementasi program.

3.3 LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian. Menurut Moleong (2017) penentuan lokasi penelitian dalam penelitian kualitatif harus mempertimbangkan keunikan, kemenarikan, dan kecocokan dengan topik yang dipilih. Lokasi penelitian harus dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan akses, kekayaan data, serta relevansi dengan fokus kajian yang sedang diteliti.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur sebagai studi kasus untuk menganalisis dampak kebijakan agraria terhadap kemiskinan struktural petani gurem di Indonesia. Pemilihan Kabupaten Gresik sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan yang matang dan relevansi tinggi dengan fokus penelitian menggunakan kerangka *Policy Failure Theory* (Mueller, 2020).

3.4 JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN

3.4.1 JENIS DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Mulyana (2018), jenis data dalam studi kasus meliputi informasi hasil wawancara, observasi, arsip, dan dokumentasi yang mampu memberikan gambaran menyeluruh serta menjelaskan kasus yang diteliti secara rinci. Fokus utama penelitian studi kasus adalah mengetahui makna dan proses secara menyeluruh. Yin (2014) juga menambahkan bahwa data studi kasus mencakup berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumen, dan bahan audiovisual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memanfaatkan beragam bukti yang saling melengkapi untuk hasil penelitian yang valid dan universal.

Data merupakan fakta atau informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab atau memecahkan fenomena dan pertanyaan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk kata-kata verbal sebagai representasi informasi yang diperoleh, bukan berupa angka atau statistik. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan cara mempelajari dan memahami informasi yang berhubungan dengan objek penelitian, yang biasanya berupa penjelasan dari pertanyaan terkait fenomena yang diamati. Artinya, data kualitatif fokus pada pengumpulan deskripsi mendalam yang menggambarkan konteks dan makna dari fenomena, yang dapat berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam bentuk bahasa atau narasi.

3.4.2 SUMBER DATA

Sumber data menurut Sugiyono (2017) ada 2 jenis, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui pengumpulan data oleh peneliti sendiri secara langsung. Biasanya data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, angket, atau teknik pengumpulan data langsung lainnya yang berinteraksi langsung dengan subjek atau informan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti dari sumber asli, melainkan melalui perantara atau media lain seperti dokumen, literatur, laporan, arsip, buku, jurnal, atau sumber tertulis lainnya yang telah dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder biasanya digunakan sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer dalam penelitian.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan konsep populasi seperti dalam penelitian kuantitatif karena fokusnya adalah pada kasus atau fenomena tertentu dalam situasi sosial spesifik. Hasil penelitian kualitatif tidak digeneralisasi ke populasi secara luas, melainkan dipindahkan ke konteks lain yang memiliki kesamaan dengan situasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut responden, melainkan narasumber, partisipan, informan, atau teman dan guru yang berperan dalam penelitian. Sampel ini bukanlah sampel statistik, melainkan sampel teoritis, karena tujuan utama penelitian kualitatif adalah membangun atau menghasilkan teori berdasarkan data yang diperoleh dari kasus yang spesifik (Sugiyono, 2017).

Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2017), istilah populasi tidak digunakan melainkan diganti dengan “*social situation*” atau situasi sosial. *Social situation* terdiri dari tiga elemen utama, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*). Ketiga elemen ini berinteraksi secara sinergis dan membentuk konteks sosial yang menjadi objek penelitian. Dalam konteks tersebut, penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada apa yang terjadi di dalam situasi sosial tersebut dengan cara mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) yang menjadi fokus penelitian.

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan tahap sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang tepat dapat menghasilkan data yang kredibel dan valid, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam pengumpulan data akan berdampak fatal karena menghasilkan data yang tidak dapat dipercaya, terutama jika data tersebut digunakan sebagai pengambilan keputusan kebijakan publik. Istilah “data” sendiri sebenarnya berasal dari metode kuantitatif yang mengacu pada angka atau tabel. Tetapi dalam penelitian kualitatif “data” merupakan segala jenis informasi, baik yang berupa lisan, tulisan, gambar, maupun foto yang berkontribusi dalam menjawab permasalahan penelitian sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah atau fokus penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif umumnya menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Menurut Sugiyono (2017), teknik pengumpulan data bisa dilakukan secara observasi (pengamatan) interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Masing-masing teknik dipilih berdasarkan jenis informasi yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian, serta disesuaikan dengan kondisi lapangan dan hubungan peneliti dengan partisipan. Dalam penelitian kemiskinan struktural para petani gurem di Kabupaten Gresik, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi partisipatif, wawancara terbuka (tidak terstruktur), dan dokumentasi.

1. Observasi Partisipatif.

Observasi adalah aktivitas pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan panca indera seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian. Hasil dari observasi berupa catatan mengenai kegiatan, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, suasana, serta perasaan atau emosi yang dialami oleh individu atau kelompok yang diamati. Observasi bertujuan untuk menggambarkan secara nyata dan akurat suatu peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan pertanyaan atau fokus penelitian, sehingga memberikan

gambaran riil tentang fenomena yang sedang diteliti. Sugiyono (2017) mengemukakan beberapa bentuk observasi, salah satunya adalah observasi partisipatif. Dalam metode penelitian observasi partisipatif, peneliti tidak hanya mengamati tetapi juga ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang/sumber yang digunakan untuk data penelitian. Peneliti melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, merasakan langsung pengalaman suka dan duka yang dialami mereka. Keterlibatan aktif ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih dalam dan lengkap karena dapat memahami makna di balik setiap perilaku yang terlihat secara mendalam.

Dalam penelitian kemiskinan struktural para petani gurem di Kabupaten Gresik, observasi partisipatif digunakan oleh peneliti untuk mengobservasi secara dalam dan ikut merasakan secara langsung bagaimana kehidupan petani gurem. Dengan observasi partisipatif diharapkan peneliti bisa mengungkap realitas dan tantangan yang sesungguhnya dihadapi oleh petani gurem, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kebijakan. Observasi partisipatif juga memberi kesempatan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan struktural sehingga hasil penelitian memberikan pengetahuan untuk rekomendasi kebijakan maupun intervensi sosial yang relevan.

2. Wawancara Terbuka (tidak terstruktur)

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi bertujuan untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab antara peneliti dengan informan/subjek penelitian. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai isu/permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, wawancara juga dapat berfungsi sebagai proses verifikasi untuk membuktikan kebenaran informasi yang sebelumnya telah diperoleh dari teknik pengumpulan data lain. Menurut Sugiyono (2017) wawancara yang bebas adalah wawancara yang di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada subjek/informan. Wawancara terbuka (tidak terstruktur) sering digunakan

dalam penelitian terdahulu atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara terbuka karena metode ini memberikan kebebasan kepada peneliti untuk menggali informasi secara mendalam tanpa dibatasi oleh pedoman wawancara yang kaku. Dengan menggunakan wawancara terbuka, peneliti dapat mengikuti alur percakapan secara alami dan menyesuaikan pertanyaan berdasarkan respon yang diberikan oleh narasumber. Hal ini memungkinkan terjadinya eksplorasi lebih luas terhadap pengalaman, pandangan, dan perasaan subjek penelitian yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Wawancara terbuka juga memungkinkan hubungan yang lebih akrab dan kepercayaan antara peneliti dan narasumber, sehingga data yang diperoleh lebih beragam dan relevan dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, informasi juga dapat diperoleh melalui fakta-fakta yang tersimpan dalam berbagai bentuk dokumen seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sejenisnya. Dokumen-dokumen ini sangat berguna untuk menggali informasi mengenai kejadian atau peristiwa di masa lalu. Menurut Sugiyono (2017), dokumentasi merupakan rekaman dari peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental hasil seseorang. Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara untuk mendukung dan memberikan data yang informatif dan kredibel.

Studi dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang relevan untuk mendukung data hasil observasi dan wawancara. Dengan memanfaatkan dokumen, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih luas tentang peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan kemiskinan struktural petani gurem di Kabupaten Gresik. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan verifikasi dan validasi data

yang diperoleh dari sumber lain sehingga menghasilkan informasi yang lebih kredibel dan sudah di uji kevalidannya.

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi, pengumpulan data dari metode observasi, wawancara, dan dokumentasi) yang dilakukan secara terus menerus hingga mencapai titik kejenuhan data. Proses pengamatan yang terus menerus menghasilkan variasi data yang sangat beragam. Data yang dikumpulkan sebagian besar berupa data kualitatif, meskipun tidak menutup kemungkinan jika peneliti menggunakan data kuantitatif. Analisis data kualitatif cenderung kompleks karena belum ada pola baku yang jelas untuk pengolahannya, sehingga sering timbul kesulitan dalam melakukan analisis secara sistematis dan mendalam.

Menurut Sugiyono (2017) dalam bukunya, mengemukakan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Pendekatan induktif dalam analisis data kualitatif berawal dari data yang dikumpulkan untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis ini kemudian diuji melalui pengumpulan data secara berulang-ulang untuk menentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika melalui proses triangulasi data yang dilakukan secara berulang hipotesis tersebut terbukti valid, maka hipotesis akan berkembang menjadi teori.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan). Sebelum melakukan *data reduction*, peneliti sebelumnya melakukan *anticipatory* (antisipatori) setelah

pengumpulan data. *Anticipatory reduction data* terjadi saat penelitian memutuskan kerangka konseptual apa, lokasi apa, pertanyaan penelitian apa, dan pendekatan pengumpulan data apa yang akan dipilih.

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang dikumpulkan di lapangan pasti jumlahnya akan sangat banyak dan beragam, maka dari itu data harus dicatat dengan teliti dan rinci. Semakin lama peneliti melakukan penelitian di lapangan, maka semakin banyak, rumit, dan kompleksnya data yang diperoleh. Karena itu harus segera dilakukan analisis data dengan cara reduksi data. Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang penting, fokus pada hal-hal utama, dan mencari tema serta pola dari data tersebut. Dengan demikian, data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya dan mencari kembali jika diperlukan.

Proses reduksi data adalah cara berpikir yang sensitif, yang membutuhkan kemampuan berpikir yang cerdas, luas, dan dalam. Dalam mereduksi data, setiap peneliti harus mengikuti tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah menemukan temuan-temuan baru. Karena itu, jika peneliti menemukan sesuatu yang dianggap belum pernah diketahui sebelumnya atau belum memiliki pola, maka hal tersebut perlu diperhatikan secara khusus dalam proses reduksi data.

2. *Data Display* (penyajian data)

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017), cara yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan menampilkan data, kita akan lebih mudah memahami apa yang terjadi, serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis, sehingga data yang ditemukan saat masuk ke lapangan dan setelah beberapa

waktu di lapangan bisa mengalami perubahan. Oleh karena itu, peneliti harus terus menguji hipotesis yang dianggap hipotetis saat awal masuk ke lapangan apakah tetap berkembang atau tidak. Jika setelah lama melakukan penelitian hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data yang dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan bisa berkembang menjadi teori yang disebut *grounded theory*. *Grounded theory* adalah teori yang ditemukan secara induktif berdasarkan data yang ditemukan di lapangan kemudian diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus. Jika pola-pola yang ditemukan sudah didukung oleh data sepanjang penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang tetap dan tidak berubah. Pola itu nantinya dilampirkan dalam laporan akhir penelitian.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah hasil baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Hasil ini bisa berupa gambaran atau penjelasan tentang sesuatu yang sebelumnya masih samar atau rancu dan setelah penelitian menjadi jelas. Hasil ini juga bisa berupa hubungan sebab-akibat, hubungan interaktif, hipotesis, atau teori. Kesimpulan yang diungkapkan awalnya masih bersifat sementara, dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat selama proses pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang diberikan di awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut bisa dianggap kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin bisa menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak, karena permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan terus berkembang.

3.7 TEKNIK KEABSAHAN DATA

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi aspek penting dalam menentukan tingkat kevalidan dan kebenaran hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2017), uji keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan serta bebas dari bias peneliti. Sugiyono mengemukakan kriteria uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, meliputi uji *credibility* (validityas interbal), *transferability* (validitas eksternal) *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan menggambarkan realitas yang sesungguhnya. Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas sering disamakan dengan validitas internal. Menurut Sugiyono (2017), untuk mencapai kredibilitas, peneliti dapat melakukan beberapa teknik, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

1.1 Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti kembali ke lapangan untuk memperdalam dan memperluas data yang telah diperoleh sebelumnya. Tujuannya agar peneliti memahami konteks penelitian secara menyeluruh dan dapat memverifikasi data yang masih diragukan. Dengan memperpanjang waktu pengamatan, peneliti juga dapat memperkuat hubungan dengan informan sehingga data yang diperoleh lebih jujur dan alami.

1.2 Peningkatan Ketekunan dalam Penelitian

Peningkatan ketekunan berarti peneliti harus cermat, teliti, dan konsisten dalam mengamati serta menafsirkan data. Ketekunan ini diperlukan agar peneliti dapat memahami pola atau gejala yang muncul secara mendalam.

Dengan meningkatkan ketekunan peneliti dapat menghindari kesalahan persepsi dan menghasilkan data yang lebih akurat dan mendetail.

1.3 Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk mengecek atau membandingkan data tersebut. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

- Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari beberapa informan.
- Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengecek data yang sama.
- Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.

1.4 Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif dilakukan dengan mencari dan menelaah data atau kasus yang tidak sesuai dengan pola hasil temuan utama. Langkah ini penting agar peneliti tidak hanya menonjolkan data yang mendukung, tetapi juga mempertimbangkan data yang berlawanan. Apabila data yang kontradiktif dapat dijelaskan secara logis, maka tingkat kredibilitas hasil penelitian akan semakin kuat.

1.5 *Membercheck*

Membercheck merupakan proses pengecekan ulang data dan informasi kepada informan yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran hasil wawancara atau observasi. Tujuan *membercheck* adalah agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan maksud dan pandangan informan. Jika hasil interpretasi peneliti disetujui oleh informan, maka data tersebut dianggap valid.

2. *Transferability*

Uji *transferability* berhubungan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam konteks lain. Menurut Sugiyono (2017), uji ini sepadan dengan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Agar hasil penelitian dapat dinilai tingkat keteralihannya, peneliti harus memberikan deskripsi yang rinci, jelas, sistematis, dan mendalam mengenai konteks penelitian. Pembaca atau pengguna hasil penelitian dapat menentukan apakah hasil tersebut dapat diterapkan pada situasi lain yang memiliki karakteristik serupa.

3. *Dependability*

Dependability berkaitan dengan sejauh mana proses penelitian dilakukan secara konsisten dan dapat ditelusuri. *Dependability* diuji melalui proses audit terhadap keseluruhan kegiatan penelitian, mulai dari penentuan fokus, pengumpulan data, analisis, hingga penyimpulan hasil. Audit ini biasanya dilakukan oleh pembimbing, ahli metodologi atau rekan yang kompeten untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan dengan benar dan konsisten.

4. *Confirmability*

Uji ini dilakukan untuk menjamin bahwa hasil penelitian benar-benar bersumber dari data yang diperoleh di lapangan bukan berdasarkan dari pandangan peneliti. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa *confirmability* merupakan kelanjutan dari *dependability* karena keduanya sama-sama mengukur sejauh mana hasil penelitian dapat diverifikasi. Peneliti harus mampu menunjukkan bukti-bukti (*audit trail*) berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen pendukung lain yang membuktikan bahwa temuan penelitian berasal dari data yang nyata. Dengan demikian, penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2022). Dampak Kultur Terhadap Lifestyle Masyarakat Nelayan (Analisis Kemiskinan Kultural pada Masyarakat Nelayan). *KOPI SUSU: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 4(1), 1–17.
- Anisah, F. K., Santoso, W., & Hidayat, S. I. (2021). EKSISTENSI PETANI GUREM DI KABUPATEN GRESIK. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 8(3), 724–736.
- Arif. (2017). IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI KEMISKINAN PETANI PERKOTAAN (Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan). *Universitas Borneo Tarakan*.
- Assan, A. (2019). STRATEGI BERTAHAN HIDUP PETANI GUREM DI DESA TUKUL KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 2019(3), 54–67.
- Borras, S. M. (2007). *Pro-Poor Land Reform: A Critique*. Ottawa: University of Ottawa Press.
- BPS. (2019). *HASIL SURVEI PERTANIAN ANTAR SENSUS (SUTAS) 2018*. BPS (Badan Pusat Statistik).
- BPS. (2023). *PETANI GUREM, Siapa Mereka?* BPS Provinsi Jambi.
- Bryson, J. M. (2011). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement (4th ed.)*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Creswell, John. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Ditjen PSP. (2022). *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Geertz, Clifford. (1963). *Agricultural Involution : the process of ecological change*. University of California Press.

- Griffin, K., Khan, A. R., & Ickowitz, A. (2002). Poverty and the Distribution of Land. *Journal of Agrarian Change*, 2(3), 279–330.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mahoney, J. (2000). Path Dependence in Historical Sociology. *Theory and Society*, 29(4), 507–548.
- Marx, K. (1977). *Capital: A Contribution to the Critique of Political Economy (Vol. I)*. Progress Publishers: Moscow.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mueller, B. (2020). Why public policies fail: Policymaking under complexity. *Economia*, 21(2), 311–323. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2019.11.002>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Nirwana, N. (2017). Deskripsi Sosial Ekonomi Keluarga Petani Gurem Di Desa Sidosari Kecamatan Natar. *Jurnal Universitas Lampung*, 1–14.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Rachman, N. F. (2016). *Reforma Agraria dan Resolusi Konflik Agraria: Perspektif Hukum*. In *Mempersoalkan Reforma Agraria (pp. 45–78)*. Yogyakarta: STPN Press.
- Saifuloh, N. I. (2023). *Analisis Determinan Kemiskinan Perdesaan Di Indonesia Periode 2015 – 2022*. Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/28608>
- Salmaa. (2022, July 19). *Cara Membuat Penelitian Terdahulu*. Deepublish.
- Statistik Sektoral Kabupaten Karawang. (2020). *Statistik Sektoral Kabupaten Karawang 2020*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Supriatna, A. (2023). Aksesibilitas Petani Kecil pada Sumber Kredit Pertanian di Tingkat Desa: Studi Kasus Petani Padi di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). LUAS LAHAN USAHATANI DAN KESEJAHTERAAN PETANI: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(1), 17.
- Syahputra, R. (2023). HUKUM AGRARIA DAN KEBIJAKAN AGRARIA DI INDONESIA. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(4), 22–27.
- Wolf, E. R. (1966). *Peasants*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Yacoub, Y., & Mutiaradina, H. (2020). Analisis kesejahteraan petani dan kemiskinan perdesaan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 2017, 92–102. <http://feb.untan.ac.id/>
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods (5th ed.)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Zulyanti, M., Zuriatin, Z., Syahbuddin, S., & Hidayat, G. (2025). Dampak Kebijakan Agraria Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Pulau Jawa, 1870-1940. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 9(2), 336–349. <https://doi.org/10.29408/fhs.v9i2.31774>